

DAFTAR PUSTAKA

- Erwis, N.A. 2012. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Skripsi Program Studi S1 Akuntansi Universitas Hasanuddin Makassar.
- Hanafi, R. 2014. *Buku Pedoman Penyusunan Pra/Skripsi*. Semarang: FE Unissula.
- Kenconowati, S. 2015. *Pengaruh Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kemudahan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Rungkut Surabaya*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya 4 (2): 1-19.
- Marduati, A. 2012. Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. Skripsi Program Studi S1 Akuntansi Universitas Hasanuddin Makassar.
- Nursalasa, M.S. 2014. Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Agency Cost pada Perusahaan Non Keuangan Yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2010. Skripsi Program Studi S1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Nursheha, R.A., Suryarini, T., dan Kiswanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak*. Accounting Analysis Journal 3 (1): 53-61.
- Nuritomo., dan H. Rossieta. 2013. *Politik Dinasti, Akuntabilitas dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*.[\(http://www.blogtopsites.com\)](http://www.blogtopsites.com). (11/12/2015).
- Purnawardhani, R., Rahayu, S.M., dan A. Jauhari. 2015. *Efektifitas Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak: Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) 1 (1): 1-9.
- Rusli, R.H.P. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak: Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha di Kota Semarang. Skripsi Program Studi S1 Akuntansi Universitas Diponegoro.

- Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.*
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.*
- Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/PMK 03/2007 tentang Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan Dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dalam Jangka Waktu Yang Ditentukan.*
- Suprianto, E. 2011. *Perpajakan di Indonesia.* Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Setiawan, W. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Indonesia. Skripsi Program Studi S1 Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Suhendri, D. 2015. *Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang: Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang.* Artikel Ilmiah. Universitas Negeri Padang.
- Velayati, M. R., Handayani, S.R., dan A. Husaini. 2013. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggal Pajak: Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Tahun 2010-2012. <http://administrasibisnis.Studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/104>. (11/12/2015).
- Wardani, D.M., Hamid, D., dan M. Djudi. 2014. *Pengaruh Sanksi Administrasi dan Surat Paksa Terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggal Pajak: Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari.* Jurnal Perpajakan 3 (1): 1-7.

WWW.Pajak.go.id